

Analisis Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

Asnedi¹ Hermansyah² Veronika Yuni Trisnowati³ Siti Hasana⁴ Zulkifli⁵ Amrul Natalsa
Sitompul^{6*} Siti Wahyu Utami⁷

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya

²Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

³Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jayabaya

⁴Fakultas Komunikasi Universitas Jayabaya

⁵Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

⁶Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

⁷Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

Abstrak

Partai politik semestinya menjadi lembaga demokrasi yang akuntabel, namun banyak partai yang terperosok pada pengelolaan bersifat personalisasi. Personalisasi partai di era reformasi telah memberi dampak buruk bagi kelembagaan partai politik. Metode dan tujuan penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi pemahaman terhadap dampak buruk dari personalisasi partai secara kelembagaan, penelitian yang digunakan dengan cara kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini, realitasnya ditemukan, partai-partai politik di Indonesia cenderung dalam situasi personalisasi, dalam bentuknya tokoh amat sentral menjadi penentu bagi partai. Oleh sebab itu, keberadaan figur ini akan menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat dari partai terhadap sosok sentral tersebut.

Kata Kunci: Partai politik, personalisasi, reformasi

Abstract

Political parties must become should be accountable democratic institutions, but many parties are mired in personalized management. Party personalization in the reform era has had a negative impact on political party institutions. It is hoped that the methods and objectives of this research will contribute to understanding the negative effect of party personalization institutionally. The research is used qualitatively. Data collection is carried out using interviews and literature studies. From the results of this research, the reality is found, political parties in Indonesia tend to be in a personalization situation, in the form of a very central figure who becomes a determinant for the party. Therefore, the existence of this figure will lead to a very strong dependence of the party on the central figure.

Keywords: *Political parties, personalization, reformation*

PENDAHULUAN

Dengan hanya menyebutkan nama Megawati, Prabowo, Gus Dur, Amien Rais, dan Surya Paloh, tentu kita sudah dapat membayangkan partai-partai apa saja yang direpresentasikan oleh masing-masing elite tersebut. Pada era Reformasi, justru identitas individu elite melekat pada partai politik dengan sangat kuat. Sosok ketua umum atau jabatan strategis lainnya tidak hanya menjadi pemimpin dan pengelola partai politik, tetapi lebih dari itu menjadi suatu citra bagi partai politik. Hal ini sesungguhnya menandakan adanya suatu gejala personalisasi politik pada diri partai-partai politik di Indonesia. Personalisasi partai politik tidak hanya berlangsung pada beberapa partai saja, tetapi

dialami atau pernah menggejala hampir di semua partai yang punya pengaruh dalam beberapa dekade terakhir. Mengapa partai-partai politik di Indonesia mengalaminya?. Padahal Undang-undang Partai Politik kita telah dirancang sedemikian rupa agar partai politik menjadi suatu institusi yang demokratis. Lalu apa dampak personalisasi partai terhadap sistem kepartaian dan demokrasi negara ini. Juga masalah. Partai politik juga bagian tak terpisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis ataupun otokratis. Papol berperan penting menyelenggarakan partisipasi politik, oleh sebab itu jenis sistem kepartaian akan berdampak signifikan terhadap sejauhmana partisipasi tersebut diperluas (Anggara, 2013).

Sejak Reformasi, sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai. Parpol telah memainkan peranan penting di berbagai lini kehidupan politik dalam upaya memperoleh jabatan pemerintahan pada level nasional dan daerah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu diterapkan untuk memilih eksekutif dan legislatif di level nasional dan daerah. Parpol tak sekadar kendaraan politik, tetapi turut memainkan peran penting dalam penyelenggaraan fungsinya seperti artikulasi dan agregasi kepentingan, komunikasi politik, pendidikan politik dan pengendali konflik. Meski begitu, era reformasi ini, parpol masih belum menunjukkan pengelolaannya dilakukan profesional dan terlembaga. (Budiatri, 2018).

Partai politik pada era reformasi juga terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai. Keputusan tertinggi biasanya berada pada seseorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Persoalan mekanisme internal dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan, dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah (Romli, 2011). Dalam proses berdemokrasi di Indonesia, khususnya untuk sistem pemilu, oligarki parpol dapat dilihat dari dua hal: Pertama, manajemen internal parpol. Selama ini hampir semua parpol peserta pemilu menggunakan manajerial *top-down*. Kemauan elit (pimpinan parpol) telah menjadi sebuah kemutlakan untuk dilaksanakan oleh segenap jajaran pengurus parpol. Dominasi pimpinan parpol (*one man show*) dalam mengatur setiap ritme kebijakan parpol mengkondisikan macetnya roda koordinasi organisasi. Kedua, pola rekrutmen. Besarnya otoritas elit parpol menjadi aspek utama tidak sehatnya pola rekrutmen, karena masing-masing pihak tak lagi menonjolkan kualitas dan kapabilitas politik. Sebaliknya hanya melakukan pendekatan personal dan emosional. Tak jarang bahkan dengan pendekatan finansial (Musa, 2017).

Permasalahan personalisasi parpol, tak hanya tercatat dalam pembentukan dan kepengurusan partai semata. Namun telah menjadi fenomena yang dianggap lumrah. Keputusan kelembagaan dari partai yang amat krusial acapkali ditentukan oleh peran sentral seorang tokoh semata, dibandingkan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Misalnya, dalam pembentukan berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.

Peran ketua umum parpol amat dominan dalam memutuskan segala sesuatu tentang sebuah partai, termasuk dalam membangun koalisi maupun penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Sehingga, struktur kepartaian dibangunkembangkan bukan berdasarkan visi bersama tentang masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Melainkan terjebak kepada kepentingan segelintir kelompok saja yang mengikuti maunya tokoh sentral tersebut. Dasar membangun kepartaian berdasarkan bagian dari pemikiran bersama dengan disertai kesepakatan bersama, cenderung terabaikan. Ideologi partai akhirnya mengikuti keputusan dan kepentingan ketua umum partai semata. Para elite partai lebih banyak memperebutkan kekuasaan daripada membangun kepemimpinan transformatif yang berjuang mengubah nasib rakyat. Paradigma kekuasaan dan kekayaan, lebih sering dikedepankan sebagai basis legitimasi politik daripada paradigma akuntabilitas. Akhirnya, parpol terjebak kepada persoalan “merebut dan mempertahankan kekuasaan” semata setiap waktunya. (Mariana, 2009).

Pengertian kekuasaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekuasaan implisit, yaitu pengaruh yang tidak kasat mata tetapi terasa; selanjutnya adalah kekuasaan eksplisit terkait dengan bahwa terlihat dan dirasakan dengan jelas pengaruhnya. Keberadaan kekuasaan implisit ini menarik perhatian pada aspek kompleks dari hubungan kekuasaan. (Surbakti, 1992) Ditinjau dari perspektif partai, semestinya diposisikan sebagai organisasi milik bersama seluruh anggotanya. Sehingga, keputusan-keputusan penting tidak boleh dihegemoni dan dimonopoli seorang ketua umum, meski ia adalah sosok yang memiliki ide awal dalam membangun partai. Semestinya, harus dibicarakan dan diputuskan oleh seluruh anggotanya sesuai dengan nilai-nilai perjuangan yang ada dalam partai tersebut. Sayangnya, anggota internal partai tidak memiliki peran penting penentuan kebijakan partai atau arah kebijakan partai karena lebih banyak ditentukan dari atas (Subagyo, 2011).

Personalisasi partai politik semestinya tidaklah muncul di era Reformasi ini. Sebab, adanya upaya reinstitusionalisasi, salah satunya melibatkan pergantian pimpinan partai, telah menjadi salah satu program penting reformasi hukum kepartaian. Sejak disahkannya Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, telah mengatur mengenai perubahan kepengurusan partai, dengan adanya mekanisme yang lebih detail diserahkan kepada internal partai-partai politik. Realitasnya tidak ber-

jalan dengan baik, penentuan arah kebijakan partai seperti koalisi menjadi bersifat pragmatis semata. Koalisi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan perebutan kekuasaan, mendasari elektabilitas semata, tanpa mempertimbangkan aspek ideologi-ideologi partai dalam membangun kesepakatan koalisi, yang seharusnya menjadi pertanyaan yang sangat mendasar namun prinsipil. Tanpa tuntunan nilai-nilai ideologis, partai akan pasti adanya penyimpangan dalam menerjemahkan nilai-nilai perjuangan.

Penjelasan di atas menekankan akan suatu saran bahwa personalisasi partai harus dihindari, karena dapat berdampak negatif tidak hanya pada partai, tetapi juga upaya Indonesia untuk menjaga demokrasi dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian yang bertujuan untuk memahami dampak personalisasi partai politik di era reformasi. Dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif yang mana menggunakan metode wawancara dan studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan melalui buku, literatur, surat kabar, majalah, dan laporan yang ada hubungannya dengan artikel ini (Nazir, 2003). Selain itu, data ini ialah hasil yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti, yang didapat dari sumber informan misalnya hasil wawancara mengenai yang diteliti (Hasan, 2002). Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan Metode Wawancara disamping studi pustaka tersebut. Menurut Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pewawancara dengan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya Personalisasi Politik pada Partai

Membahas personalisasi partai, terdapat beberapa karakteristik yang umumnya muncul pada kasus-kasus partai. Karakteristik pertama, yakni adanya kondisi ketika pemimpin partai menjadi identitas yang melekat kepada partai. Pemimpin ini bukan hanya berperan sebagai ikon partai melainkan memainkan fungsi kepartaian secara kelembagaan, ini menunjukkan peran kelembagaan tergantikan

oleh tokoh politik sentral tersebut. Masyarakat pemilihnya juga mengetahui partai itu sebagai bagian tak terlepas dari individu pemimpin partainya. Dengan kondisi ini, pemimpin partai kemudian menjadi titik kekuasaan sentral partai, yang mengalahkan elemen struktur kepengurusan partai lainnya. Karakteristik kedua, adalah penempatan individu pemimpin partai sebagai cara memperoleh dukungan bagi partai tersebut, khususnya pada saat pelaksanaan pemilu (Sandri, 2015). Karakteristik lainnya, adalah tentang lamanya pengaruh individu pemimpin elite itu terhadap partai tersebut. Bagi partai yang mengalami personalisasi politik, individu elite partai itu memiliki pengaruh terhadap partai dalam jangka waktu yang lama. Hal ini memberikan kemungkinan bagi pemimpin partai untuk mendominasi berbagai kebijakan dan keputusan partai, serta menimbulkan ketergantungan dari partai terhadap pemimpin berpengaruh tersebut. Sehingga, mengesankan partai politik dapat berkembang hanya karena figur tokoh sentral tersebut (Sandri, 2015). Beberapa karakteristik tersebut melekat pada partai-partai politik yang mengalami persoalan personalisasi politik.

Pada era reformasi, berbagai partai nasionalis muncul lekat dengan imej kepada para elit yang mendirikan atau menggagas kehadiran partai tersebut. Hal ini seperti terlihat pada partai yang dikategorikan personalisasi kuat adalah PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Sementara, Partai Nasdem memiliki kecenderungan personalisasi kuat tetapi belum dapat disimpulkan secara utuh karena usia partai yang masih sangat muda. Meski begitu, peran pendirinya Surya Paloh sangat memengaruhi semua keputusan partai tersebut. Sementara, Partai Hanura terkategori sedang, meski pada perkembangan terakhirnya belum bisa diprediksikan karena ada suksesi kepemimpinan dari Wiranto ke Oesman Sapta Odang (OSO), dalam dinamika saat ini Oesman Sapta Odang telah mengambil kendali partai meski kecil kemungkinannya tanpa “direstui” oleh Wiranto, juga dalam keterpilihan OSO untuk kedua kalinya memimpin tersebut. Partai Golkar terkategori personalisasi lemah karena kecenderungan yang terjadi pada Partai Golkar bukanlah personalisasi melainkan oligarki. Di sisi lain, Partai Golkar juga menunjukkan dinamika internal di tingkat partai yang teramat tinggi sehingga menghadirkan beragam faksi. Hal yang menjadi catatan penting dalam kasus personalisasi partai nasionalis adalah pola personalisasi yang cenderung bersifat stagnan.

Masa kepemimpinan dari tokoh sentral yang memainkan peran personalisasi politik ini terkesan tak tergoyahkan.

Pada tahun 2009 silam, telah terjadinya perubahan kategorisasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengalami keterbukaan, sehingga lebih mengidentifikasi partai sebagai partai nasionalis dibandingkan sebagai partai identitas Islam. Tujuannya memperoleh pemilih sebanyak-banyaknya sehingga memperluas identitas kepartaiannya, meski PAN masih dengan dukungan konstituen dari Muhammadiyah. Dalam perkembangannya personalisasi Amien Rais pada menuju Pemilu Serentak 2024 ini tersingkirkan, tetapi pergeseran ini tidak melepaskan persepsi Zulkifli Hasan ini menjadi tokoh baru (imej) PAN setelah tidak lagi bersama Amien Rais. Meski baru dua periode, kecenderungan ini sudah kentara dalam pengambilan keputusan/kebijakan partai tersebut. Sehingga akhirnya, sosok Amien Rais memilih mendirikan Partai Ummat.

Selanjutnya, PKB, awalnya mengalami personalisasi partai melalui KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetapi personalisasi tersebut mulai melemah ketika digantikan oleh personalisasi yang dibangun oleh Muhaimin Iskandar, meski personalisasi terhadap sosok Muhaimin cenderung melemah jika menganalisisnya dari konstituennya yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Namun, dengan kepemimpinan selama 17 tahun, M. Iskandar menunjukkan PKB mengalami personalisasi partai.

Pada tabel di bawah ini, tergambarkan ada tujuh partai yang dinilai menggejala personalisasi politik dari sembilan parpol yang memperoleh kursi di parlemen pada periode 2019-2024 ini. Setiap partai tersebut memiliki seorang individu yang identik dan berpengaruh kuat terhadap partai, sebagai berikut.

Tabel 1. Peta Personalisasi Partai Politik Di Era Reformasi

No	Partai Politik	Tokoh Partai Politik	Posisi Dalam Partai	Posisi Pencalonan Pilpres
1	PDIPP	Megawati	- Pendiri Partai - Ketua Umum	- Capres Pilpres 1999 - Terpilih Wapres - Dilantik Presiden
2	Demokrat	- Susilo Bambang Yudhoyono - Agus Harimurti Yudoyono	- Penggagas Partai - Ketua Umum - Ketua Majelis Partai	- Capres Pilpres 2004 - Terpilih 2 periode
3	PAN	- Amien Rais - Zulkifli Hasan	- Pendiri Partai - Ketua Umum Partai	Capres Pilpres 2004
4	PKB	- Abdurrahman Wahid - Iskandar Muhaimin	- Pendiri PKB - Ketua Dewan Syuro - Ketua Umum Partai	Capres Pilres 1999
5	Gerindra	Prabowo Subianto	- Pendiri Partai Gerindra - Ketua Dewan Pembina - Pendiri Partai HamuraKetua Umum	- Capres Pilpres 2009 - Capres 2014 & Capres 20 - Capres Tahun 2024
6	Partai Hati Nurani Rakyat	- Wiranto - Oesman Sapta Odsang	- Pendiri Partai HamuraKetua Umum - Ketua Umum Partai	Capres Pilpres 2009
7	Partai Nasional Demokrat	Surya Paloh	- Pendiri Partai - Ketua Majelis Partai	Pemenu dari pemilihan koal dan pasangan calon presiden wakil presiden

Berikut ini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemilu tahun 1999 sampai pemilu tahun 2014. Pertama adalah “Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia-Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ummat, Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia, Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah, Partai Karya Peduli Bangsa”.

Partai politik yang kedua adalah PAN (Partai Amanat Nasional). Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organisasi gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung

tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Partai yang ketiga adalah PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang lahirnya dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, tetapi setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia. PDI-P didirikan setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie yang bertujuan untuk menyongsong Pemilu 1999. Kongres I PDI-P berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000. Pada pemilu 1999, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan. Hal ini dikarenakan kalah *voting* dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden. Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Pada Pemilu Presiden 2004, PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Pada Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P kembali turun ke peringkat ketiga dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI-P kemudian bersama dengan Partai Gerindra mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2009. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 kali ini, PDI-P berhasil meraih peringkat pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan kursi DPR

sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama dengan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sejak Muktamar ke-3 pada April 2010 di Medan, partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum, sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. menjabat sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan reformasi di Indonesia disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya krisis di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kepercayaan. Pada masa reformasi, kehidupan politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang lebih baik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya sistem kepartaian yang baru. Dampak dari adanya sistem kepartaian yang baru dapat terlihat secara menyeluruh dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. Partai politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999 hanya 48 partai saja. Hasilnya tidak ada partai yang secara tunggal mendominasi dan memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintahan. Partai politik yang lolos seleksi untuk menjadi peserta pemilu 2004 hanya 24 partai. Pada pemilihan umum ini, terdapat 7 partai yang memenuhi electoral threshold. Partai-partai tersebut adalah Golkar, PAN, PDIP, PPP, PBB.

KESIMPULAN

Dampak personalisasi politik terhadap sistem kepartaian di Indonesia menghambat regenerasi kader partai maupun rekrutmen politik. Personalisasi partai juga menunjukkan kelemahan parpol secara kelembagaan. Kepengurusan partai saat ini menjadi akar permasalahan, karena pada akhirnya para tokoh utama memiliki kekuasaan dan kekuasaan pengambilan keputusan yang sedemikian rupa, sehingga keputusan dan kebijakan partai

ditentukan oleh tokoh politik sentral tersebut. Kondisi ini menyebabkan ideologisasi dan penanaman nilai-nilai idealisme menjadi seadanya. Perjalanan partai secara kelembagaan tak bisa dilepaskan dari kepentingan tokoh politik itu saja. Selain itu, ketergantungan partai pada tokoh sentral dapat menyebabkan partai terseret pada kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum yang seharusnya diprioritaskan oleh partai. Ini juga mencerminkan erosi sistem kepartaian dan kegagalan sistem kepartaian.

Kepemimpinan partai politik di Indonesia cenderung terperangkap dalam fenomena personalisasi politik dikarenakan utamanya adalah absennya spektrum ideologi dalam kepemimpinan maupun institusionalisasi partai. Kondisi tersebut yang membuat partai politik pada akhirnya minim ide yang diperjuangkan dalam merebut suara pemilih. Pada akhirnya, mereka lebih cenderung memasang calon populer. Faktor penyebab dan yang memfasilitasi terbentuknya personalisasi partai ini tidaklah tunggal, melainkan banyak faktor yang saling berkelit. Personalisasi partai telah merebut kesempatan dan persamaan hak untuk dipilih dalam kancah sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden maupun sistem pemilihan kepala daerah, ini adalah bagian dari konsekuensi sistem kepartaian dengan sistem multipartai yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan pelembagaan partai ke depannya adalah sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan tertinggi parpol ialah ketua umum, untuk menata terbentuknya kepemimpinan parpol yang demokratis. Oleh karena itu, perlu memasukkan aturan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol dalam undang-undang agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh parpol; Kedua, aturan yang juga turut mendorong partai-partai politik agar dalam pengambilan keputusan melibatkan konstituennya dan juga hirarki berjenjang dari struktur di tingkat partai; dan Ketiga, memperkuat peran mahkamah partai politik untuk menjadi lembaga peradilan yang independen. Mahkamah partai juga didorong untuk mengawal proses pengambilan keputusan dari kelembagaan partai menjadi lebih baik, sehingga peran penting dari personalisasi politik di dalam partai politik dapat merosot drastis.

REFERENSI

- Amal, I. 1996, *Teori-teori mutakhir partai politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Anggara, S. 2013, *Sistem politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2002, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. 2002, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiatri, A.P. (ed.), 2018, *Personalisasi partai politik di Indonesia era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dhakidae, D. 2004, 'Partai-partai politik, demokrasi, dan oligarki', dalam Tim Litbang Kompas (ed.) *Partai-partai politik Indonesia: Ideologi dan program*. Jakarta: Kompas, p. 5.
- Ellwein, W. dan Subagyo, H. 2011, *Konstituen: Pilar utama partai politik, modul pendidikan politik: Manajemen konstituen*. Jakarta: [penerbit tidak tercantum dalam sumber].
- Hasan, M.I. 2002, *Pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heywood, A. 2014, *Politik*. Edisi keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kacung Marijan. 2012, *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru*. Edisi ketiga. Jakarta: Kencana.
- Mariana, D. 2009, *Dinamika demokrasi dan perpolitikan lokal di Indonesia*. Bandung: AIPI.
- Moleong, L.J. 2009, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, A.M. 2017, 'Merancang sistem multipartai sederhana dan penguatan sistem presidensial', *Jurnal Ketatanegaraan*, 005.
- Nazir, M. 2003, *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamungkas, S. 2011, *Partai politik: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Rohaniah, Y. dan Efriza, 2015, *Pengantar ilmu politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Romli, L. 2018, 'Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia', *Jurnal Politica*, 2(2).
- Surbakti, R. 1992, *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.

Winarno, B. 2008, *Sistem politik Indonesia era Reformasi*. Edisi kedua. Yogyakarta: MedPress.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024, *Sumber data KPU RI tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Jakarta: Sekretariat Negara